

RUMUSAN SIDANG I TAHUN 2023
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

Pada Hari Ini Selasa, Tanggal Empat Belas, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan Sidang I Tahun 2023 Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut :

I. Pimpinan Sidang

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

II. Peserta Sidang

- 1) Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Tamu undangan :
 - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai di Jawa Tengah;
 - Kepala Balai PSDA se Jawa Tengah;
 - Pejabat Struktural di lingkungan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
 - Tim Sekretariat Dewan SDA Provinsi Jawa Tengah.

III. Agenda Sidang I Tahun 2023

1. "Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Tengah" disampaikan oleh Susilo Margono, S.Hut., M.Ling. – Koordinator Penyuluh Kehutanan Jawa Tengah.
2. "Kolaborasi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo" disampaikan oleh Yosiandi Radi Wicaksono - Kepala Bidang PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

IV. Kesimpulan

A. Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Tengah

1. Tutupan lahan pada areal perhutanan sosial dengan skema IPHPS <15% dan sebagian besar komoditas yang ditanam adalah tanaman pertanian semusim yang mengakibatkan perubahan koefisien run-off menjadi lebih besar;
2. Dari 31 SK IPHPS yang sudah mulai melakukan penanaman tanaman kayu-kayuan atau MPTS mencapai 70% kelompok;
3. Dari 55 SK Kulin KK memiliki tutupan lahan yang cukup bagus >80%, digunakan untuk pemanfaatan lahan bawah tegakan dan pengembangan jasa wisata alam;
4. Jumlah Tanaman Kayu-Kayuan & MPTS pada Hutan Adat kurang lebih 40 % dan 60% Tanaman Semusim (Jagung).

B. Kolaborasi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo

1. Pembangunan Bendungan Bener (PSN) sebagai pekerjaan kompleks diperlukan dukungan semua pihak;
2. Komunikasi sosial sangat penting, masyarakat terdampak perlu sangat diperhatikan;
3. Diperlukan konsep penanganan jangka panjang yang bersifat multisektoral.

V. Rekomendasi

1. Perlunya review pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial difasilitasi oleh Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah;
2. Mendorong monitoring dan evaluasi, implementasi perhutanan sosial berdasarkan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Mengusulkan adanya pendelegasian kewenangan monitoring dan evaluasi perhutanan sosial kepada Pemerintah Daerah;
4. Mendorong program Perhutanan-sosial masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
5. Perlunya penguatan kelembagaan dalam pendampingan Program Perhutanan Sosial;
6. Perlunya dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Proyek Strategis Nasional termasuk pembangunan bendungan;
7. Perlu rehabilitasi pada Daerah Tangkapan Air (DTA) dan pengelolaan sabuk hijau melalui kerja sama dengan masyarakat.

Demikian rumusan hasil sidang ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku
Kuasa Ketua Harian
Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah



DADANG SOEMANTRI, ATD, MT

NIP 19650622 198703 1 007